



# ANALISIS PENGARUH PDRB PER KAPITA, PERATURAN PAJAK PROGRESIF, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2010-2016

Oscar Bryan Widjaja<sup>1</sup>

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Bambang Sugiarto

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## ABSTRAK

Dalam keadaan perekonomian di Indonesia seperti sekarang ini, pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatan negara guna untuk terus membangun infrastruktur Negara Indonesia demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyatnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta bahwa rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan selalu lebih tinggi pada setiap tahunnya, namun pada saat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pemprov DKI Jakarta mendapati bahwa ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi. Masalah yang timbul ialah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih rendah dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor. Variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor, PDRB per kapita, Peraturan Pajak Progresif, dan Jumlah Penduduk. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 sampel yaitu data yang didapatkan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Microsoft Excel 2013. Hasil Penelitian menunjukkan bukti PDRB per kapita dan Peraturan Pajak Progresif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

**Kata Kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, PDRB Perkapita, Peraturan Pajak Progresif, Jumlah Penduduk

## ABSTRACT

In the current state of the economy in Indonesia, the government should be able to increase state revenues to continue to build the infrastructure of the State of Indonesia in order to achieve its welfare of all its people. Based on data obtained from the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency, the plan for the acceptance of Vehicle Tax is expected to be higher every year, but at the time of the realization of the DKI Jakarta Provincial Motor Vehicle Tax revenue found that the mismatch between the plan and the realization. The problem that arises is the realization of lower motor vehicle tax revenues compared to the plan of tax revenues of motor vehicles. Variables in this study are Motor Vehicle Tax, GRDP per capita, Progressive Tax Regulation, and Population. The sample used in this research is 7 samples, the data obtained obtained from the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency and the Central Bureau of Statistics. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using Microsoft Excel 2013. The results showed evidence of per capita GRDP and Progressive Tax Regulation affect the acceptance of Motor Vehicle Tax.

**Keywords:** Motor Vehicle Tax, Per Capita GDP, Progressive Tax Regulation, Population

<sup>1</sup>Oscar Bryan Widjaja

089523307674 | oscarbryan95@yahoo.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin IBIKKG. Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie). Penyalinan dan penyebaran tanpa izin IBIKKG. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin IBIKKG. Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie). Penyalinan dan penyebaran tanpa izin IBIKKG.

## PENDAHULUAN

Dalam keadaan perekonomian di Indonesia seperti sekarang ini, pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatan negara guna untuk terus membangun infrastruktur Negara Indonesia demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyatnya. Salah satu pemerintah yang berkontribusi dalam proses pembangunan negeri ini adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus mampu meningkatkan pendapatannya melalui penerimaan pajak, salah satu jenis pajak yang dapat meningkatkan pendapatan Pemprov DKI Jakarta adalah pajak daerah.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap wilayah yang ada di provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta bahwa rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan selalu lebih tinggi pada setiap tahunnya, namun pada saat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pemprov DKI Jakarta mendapati bahwa ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi. Masalah yang timbul ialah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih rendah dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Jika kita melihat keadaan sektor transportasi saat ini bahwa jumlah kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta terbilang cukup tinggi, hal ini terlihat dengan adanya penumpukan jumlah kendaraan bermotor di setiap jaringan jalan yang menyebabkan kemacetan. Berarti seharusnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor haruslah lebih tinggi.

Mungkin dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Terlebih disaat adanya razia kendaraan bermotor mengenai pajak kendaraan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh jajaran kepolisian wilayah DKI Jakarta.

Beberapa waktu lalu tepatnya bulan februari 2017 hingga agustus 2017 Pemprov DKI Jakarta bersama badan pajak dan retribusi daerah ikut berpartisipasi memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan keringanan denda hingga pembebasan denda bagi setiap masyarakat yang telat ataupun tidak pernah membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengan adanya kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan jajaran kepolisian yang turut serta membantu mengumpulkan dana pajak kendaraan bermotor tersebut sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berarti penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh faktor-faktor lain, selain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan kurangnya pengetahuan tentang membayar pajak.

Beberapa faktor lain yang sering mempengaruhi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor bermacam-macam mulai dari faktor pendapatan yang diterima masyarakat, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil yang mendominasi, hingga faktor jumlah penduduk yang kurang pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak guna memajukan pembangunan di wilayah DKI Jakarta demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Peraturan Pajak Progresif, dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah DKI Jakarta tahun 2010-2016”. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui apakah terdapat bukti bahwa variabel independen PDRB per kapita, peraturan pajak progresif, dan pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.



## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pajak

Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

### Teori Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Teori Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak.

### Teori Pajak Progresif

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, paling tidak terdapat 2 (dua) jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Kendaraan Bermotor.

### Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita dapat disebut juga sebagai Pendapatan per kapita. Cara mendapatkan angka PDRB per kapita suatu daerah ialah dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Seperti yang telah diketahui bahwa pendapatan penduduk Provinsi DKI Jakarta tertinggi nomor satu di bandingkan dengan provinsi lainnya diseluruh Indonesia. Dengan tingginya tingkat pendapatan yang diterima oleh penduduk DKI Jakarta diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah DKI Jakarta.

H1: PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

### Pengaruh Peraturan Pajak Progresif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Seiring jumlah penduduk yang meningkat, maka kebutuhan penduduk terhadap alat transportasi akan meningkat. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya, terutama kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat, serta kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama atau alamat yang sama dalam satu kartu keluarga diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah DKI Jakarta.

H2: Peraturan Pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.



## Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta termasuk kedalam 7 provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terutama pada penduduk yang sejahtera dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan seiring berkembangnya teknologi, dan kebutuhan penduduk terhadap alat transportasi dalam menjalankan aktivitas semakin meningkat.

H3: Pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## METODE PENELITIAN

Data objek penelitian ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) daerah DKI Jakarta, dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidak berpengaruh antara pendapatan per kapita, pajak progresif kendaraan bermotor, dan jumlah penduduk yang dikaitkan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah DKI Jakarta. Adapun rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni berkaitan dengan penelitian kuantitatif dan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) daerah DKI Jakarta, dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dirancang untuk mengamati pengaruh PDRB per kapita, pajak progresif kendaraan bermotor, dan pertumbuhan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi dan instansi-instansi pemerintah seperti Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut berupa data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta selama tahun 2010 sampai tahun 2016.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu sebagai berikut:

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah suatu studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk menganalisis dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Model matematis persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PKB = \beta_0 + \beta_1 Pdrb + \beta_2 PjkPgs + \beta_3 Pnddk + \epsilon$$

Dimana:

- PKB = Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
- Pdrb = Produk Domestik Regional Bruto per kapita
- PjkPgs = Peraturan Pajak Progresif
- Pnddk = Jumlah penduduk
- $\epsilon$  = Standar error

## Uji Signifikansi Simultan ( Uji F )

Uji F adalah pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Mengambil keputusan untuk Uji F menurut McClave, Benson, dan Sincich (2014:408) adalah:

- 1) Jika P-value atau Significance F  $< \alpha = 0.05$ , maka model regresi yang digunakan dapat memprediksi variabel dependennya.
- 2) Jika P-value atau Significance F  $> \alpha = 0.05$ , maka model regresi yang digunakan tidak dapat memprediksi variabel dependennya.

Setelah melihat nilai P-value, untuk mengetahui seberapa model itu baik digunakan adalah dengan melihat nilai  $R^2$  atau R Square. Nilai  $R^2$  pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil kesimpulan signifikansi uji t dapat dilihat pada tabel Koefisien Regresi dengan membandingkan taraf nyata dengan P-value. Mengambil keputusan dengan uji T menurut McClave, Benson, dan Sincich (2014:408) sebagai berikut :

- 1) Jika P-value setelah dibagi dua  $\leq \alpha = 0.05$ , maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika P-value setelah dibagi dua  $> \alpha = 0.05$ , maka tidak terdapat pengaruh yang secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

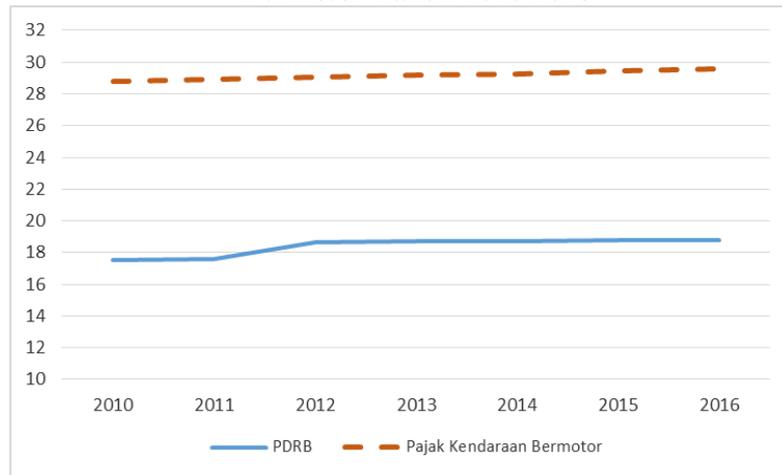
### Hasil Penelitian

### Analisis Deskriptif

Dalam melakukan pengolahan data, peneliti menggunakan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan objek penelitian ini. Data-data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Daerah DKI Jakarta mengenai Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, dan Jumlah Penduduk, serta penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Untuk data peraturan pajak progresif penulis menggunakan data dummy, yaitu sebelum berlakunya peraturan pajak progresif dengan nama dan alamat dalam satu kartu keluarga dilambangkan dengan angka 0, dan berlakunya peraturan pajak progresif dengan nama dan alamat dalam satu kartu keluarga dilambangkan dengan angka 1.

Penulis melakukan Logaritma natural (Ln) terlebih dahulu terhadap data yang dimiliki agar seluruh data yang diperoleh menjadi linear saat dilakukannya pengujian. Berikut dijelaskan grafik mengenai data yang akan dilakukan pengujian:

**Gambar 4.3**  
**Grafik Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per kapita dan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2010-2016**



Sumber : Hasil Olahan Microsoft Excel

Pada grafik diatas dapat menjelaskan apabila Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang diterima oleh penduduk DKI Jakarta naik, maka tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik, seperti pada tahun 2011 ke tahun 2012. Variabel Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang ditunjukkan grafik mengalami kenaikan yang signifikan namun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mengalami kenaikan yang terlalu signifikan.

**Gambar 4.4**  
**Grafik Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pajak Progresif Tahun 2010-2016**



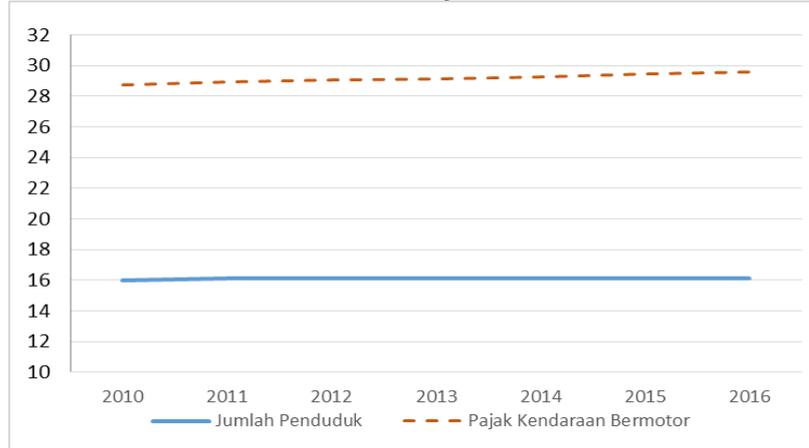
Sumber : Hasil Olahan Microsoft Excel

Pada grafik diatas dapat menjelaskan apabila peraturan pemerintah tentang pajak progresif diberlakukan maka tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik, seperti pada tahun 2015 ke tahun 2016. Variabel Peraturan Pajak Progresif yang ditunjukkan grafik mengalami kenaikan yang signifikan, namun penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mengalami kenaikan yang terlalu signifikan

Hal ini dapat disebabkan peraturan pajak progresif mulai berlaku pada tahun 2010 hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2015 dan tahun 2016, pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama dalam satu kartu keluarga akan dikenakan tarif pajak progresif. Yang pada tahun sebelumnya tarif pajak progresif hanya berlaku untuk pemilik dengan nama yang sama dalam satu kartu keluarga.



**Gambar 4.5**  
**Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2010-2016**



Sumber : Hasil Olahan Microsoft Excel

Pada grafik diatas dapat menjelaskan apabila jumlah penduduk wilayah DKI Jakarta tumbuh, maka tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik, seperti pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Variabel jumlah penduduk tidak terlihat adanya kenaikan yang signifikan begitu pula penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.3**  
**Output Uji Regresi Linier Berganda**

	Coefficients
Intercept	9,675751637
Produk Domestik Regional Bruto per kapita	0,223420263
Peraturan Pajak Progresif	0,27398304
Jumlah Penduduk	0,949706146

Sumber : Hasil Data Lampiran III

Dari tabel di atas, maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut :

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor = 9,675 + 0,223 Produk Domestik Regional Bruto per kapita + 0,273 Pajak Progresif + 0,949 Jumlah penduduk.

Dengan memasukkan suatu bilangan tertentu ke dalam model persamaan regresi diatas, maka hal ini dapat memperkirakan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Jika Produk Domestik Regional Bruto per kapita mengalami kenaikan sebesar 1000 juta rupiah, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar Rp 223.000.000
- Jika Peraturan Pajak Progresif berlaku, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar Rp 273.000.000
- Jika Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1000 juta penduduk, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar Rp 949.000.000



**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian regresi linear yang dilakukan penulis terhadap variabel independen Produk Domestik Regional Bruto per kapita memiliki nilai *p-value* 0,034152557/2 menjadi sebesar 0,0170763 dibulatkan menjadi 0,017. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat bukti jika tingkat Produk Domestik Regional Bruto per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi nilai *p-value* sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis awal dan grafik pada analisis deskriptif yang diajukan penulis sebelumnya, sehingga apa yang telah dijabarkan oleh penulis terbukti dengan adanya kenaikan tingkat pendapatan yang diterima oleh penduduk DKI Jakarta maka selain dapat memenuhi kebutuhan pangan dan papan, setiap penduduk berkeinginan untuk memiliki kendaraan pribadi guna memenuhi kebutuhan transportasi penduduk DKI Jakarta. Dengan adanya bukti tersebut, maka Produk Domestik Regional Bruto per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi DKI Jakarta.

**Pengaruh Peraturan Pajak Progresif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian regresi linear yang dilakukan penulis terhadap variabel independen Peraturan Pajak Progresif memiliki nilai *p-value* 0,026263991/2 menjadi sebesar 0,0131319 dibulatkan menjadi 0,013. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear tersebut maka dapat dikatakan bahwa terdapat bukti dengan adanya peraturan pajak progresif berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi nilai *p-value* sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil dari pengujian ini sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan penulis sebelumnya, sehingga apa yang telah dijabarkan oleh penulis terbukti dengan diberlakukannya peraturan pajak progresif yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan selain kebutuhan masyarakat akan transportasi, kendaraan pribadi sering digunakan sebagai lambang kekayaan seseorang apabila memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu kendaraan bermotor. Dengan adanya bukti tersebut, maka Peraturan Pajak Progresif berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi DKI Jakarta.

**Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian regresi linear yang dilakukan penulis terhadap variabel independen Jumlah Penduduk memiliki nilai *p-value* 0,165478651/2 menjadi sebesar 0,0827393 dibulatkan menjadi 0,082. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat bukti jika jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi nilai *p-value* sebesar 0,082 lebih besar dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil dari pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan penulis sebelumnya, sehingga apa yang telah dijabarkan oleh penulis tidak terbukti dengan kenaikan jumlah penduduk mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penulis beranggapan jumlah penduduk yang meningkat adalah penduduk kelas bawah dalam arti ekonomi sehingga tidak semua penduduk dapat memiliki kendaraan pribadi, seperti yang diketahui bahwa jumlah penduduk miskin selalu meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data terakhir yang peroleh penulis dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 412.000 jiwa, sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 371.300 jiwa sehingga jumlah penduduk yang miskin setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut.

1. Terdapat bukti bahwa Produk Domestik Regional Bruto per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah DKI Jakarta.
2. Terdapat bukti bahwa Peraturan Pajak Progresif berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah DKI Jakarta.
3. Tidak terdapat bukti bahwa Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah DKI Jakarta.

### Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian berikutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lainnya seperti menggunakan data sample jumlah kendaraan bermotor hanya untuk jenis mobil dan sepeda motor, hal ini agar dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih valid.
2. Penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan teknik analisis Uji Beda untuk melihat tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan sebelum dan sesudah diberlakukan nya peraturan pajak progresif.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menganalisis dari data saja namun juga menyertakan teknik wawancara kepada pihak yang terlibat agar hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R., dan Pamela S. Schindler. (2014). *Business Research Methods*. Twelfth Edition. New York: Mc Graw Hill International Edition.
- Ghozali, Imam (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- James T. Mc. Clave & P.George Benson (2014), *Statistics for Business and Economics*, Edisi 12, United States of America : Pearson Education, Inc.
- Keputusan, di Akses 25 Mei 2017 <http://www.jakarta.bps.go.id>
- Lasmana, J Eko. (2017), *Undang-Undang Pajak Lengkap*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lukman, Jamila Fitrahma Aisyah. (2015), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep*, Makasar: Universitas Hasanudin.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mc Clave, James T., P.George Benson & Terry Sincich (2014), *Statistics for Business and Economics*, Edisi 12, United States of America : Pearson Education, Inc.
- Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, di Akses 16 April 2017 <http://www.dpp.jakarta.go.id>
- Produk Domestik Regional Bruto, di Akses 19 Mei 2017 <http://www.jakarta.bps.go.id>
- Samudra, Azhari Aziz (2015), *Perpajakan di Indonesia*, Edisi 1, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, Marhot P. (2013), *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Edisi 3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wulandari, Ita. (2012), *Analisis Implementasi Samsat On-Line Tiga Provinsi Pada Samsat Jakarta Selatan*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yurida, Pheni. (2012), *Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas Di DKI Jakarta*, Jakarta: Universitas Indonesia.



LAMPIRAN DATA DAN HASIL OUTPUT MICROSOFT EXCEL

Lampiran I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Milik KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Data Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta tahun 2010-2016.

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rp)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2010	41.037.969	8.524.152	3.107.744.107.420
2011	43.297.572	10.187.595	3.664.400.165.006
2012	123.962.382	9.761.407	4.106.968.370.530
2013	130.060.315	9.988.329	4.605.206.082.027
2014	136.312.386	10.075.310	4.979.110.607.650
2015	142.868.242	10.177.924	6.079.910.054.399
2016	147.060.000	10.277.628	7.141.515.131.349

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



**Lampiran II**

Data LN Produk Domestik Regional Bruto per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor DKI Jakarta tahun 2010-2016.

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto per kapita	Pajak Progresif	Jumlah Penduduk	Pajak Kendaraan Bermotor
2010	17,53000827	0	15,9584141	28,76491821
2011	17,58360712	0	16,13668136	28,92968577
2012	18,63548871	0	16,09394711	29,04370625
2013	18,68350886	0	16,11692787	29,15820854
2014	18,73045977	0	16,12559843	29,2362724
2015	18,77743338	1	16,13720058	29,43601102
2016	19,15300056	1	16,14548005	29,59694607

Sumber : Data Olahan Microsoft Excel

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penelitian yang diterbitkan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan atau masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran III

Hasil Olah Data

Regression Statistics	
Multiple R	0,986954663
R Square	0,974079507
Adjusted R Square	0,948159014
Standard Error	0,065416638
Observations	7

ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	3	0,482446145	0,160815382	37,57951317	0,007029226
Residual	3	0,012838009	0,004279336		
Total	6	0,495284154			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	9,675751637	7,862842402	1,230566665	0,306171974	-15,34732211	34,69882539	-15,34732211	34,69882539
progresif	0,223420263	0,060297594	3,705293141	0,034152557	0,031526406	0,41531412	0,031526406	0,41531412
jumlah penduduk	0,27398304	0,066838253	4,099195125	0,026263991	0,061273889	0,486692191	0,061273889	0,486692191
	0,949706146	0,520362472	1,825085775	0,165478651	-0,706319481	2,605731773	-0,706319481	2,605731773

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Halaman ini dilindungi Undang-Undang

Penelitian ini sebagai alat bantu untuk penulisan kritik dan tinjauan terhadap masalah.

Penelitian ini sebagai alat bantu untuk penulisan kritik dan tinjauan terhadap masalah.

Penelitian ini sebagai alat bantu untuk penulisan kritik dan tinjauan terhadap masalah.